PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
INSPEKTORAT DAERAH
Jl. GOR Nomor 11 Blora - 58219 Telp./Faks (0296) 533266
Email : inspektorat@blorakab.go.id, inkab.bla@gmail.com
Tegas, Obyektif, Profesional (TOP)

Nomor : 700/048/086.OP/W.I/2022
Sifat Rahasia
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Blora, 22 Juli 2022

Kepada :
Yth. Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Blora
di-
B L O R A

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Permen PAN & RB RI Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Bupati Blora Nomor 28 Tahun 2019 tentang Petunjuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Blora, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Kami telah melakukan Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora, dengan tujuan:
   1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
   2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
   3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;.
   4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
   5. Memonitor tindak lanjut saran hasil evaluasi periode sebelumnya.
b. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar Manajemen Kinerja, meliputi Perencanaan Kinerja 30 %, Pengukuran Kinerja 30%, Pelaporan Kinerja 15%, Evaluasi Akuntabilitas Internal 25%.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).

c. Dokumen OPD yang dievaluasi adalah Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK) Eselon II, III dan IV, Rencana Aksi (Renaksi), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP), Cascading serta dokumen perencanaan terkait lainnya.

d. Hasil evaluasi AKIP yang dituangkan adalah dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora memperoleh **nilai sebesar 71,00 %** dengan predikat **BB - Sangat Baik** dikarenakan sudah terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinetja yang andal berbasis teknologi informasi serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.

e. Nilai sebagaimana tersebut di atas, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora, dengan penilaian evaluasi sebagai berikut:

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30%	23,10%
2.	Pengukuran Kinerja	30%	19,50%
3.	Pelaporan Kinerja	15%	11,40%
4.	Evaluasi Akuntabllitas Kinerja Internal	25%	17,00%
Nilai Hasil Evaluasi		100%	71,00%

1. **Perencanaan Kinerja**

Nilai komponen perencanaan kinerja mencapai 23,10 dari bobot penilaian sebesar 30%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari tiga sub komponen yaitu pemenuhan dokumen, kualitas dokumen dan implementasi dokumen terhadap perencanaan kinerja yang meliputi Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK) Eselon II, III dan IV, Rencana Aksi (Renaksi), Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKJiP), Cascading serta dokumen perencanaan terkait lainnya.

Pada komponen Perencanaan Kinerja ditemukan hal – hal sebagai berikut :

a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora telah menyusun Rencana Aksi atas Kinerja, namun untuk Dokumen Indikator Kinerja Individu belum tersusun.
b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora telah menyusun Rencana Aksi atas Kenerja, namun belum dimonitor pencapaiannya dan di evaluasi secara berkala.

2. **Pengukuran Kinerja**

Nilai komponen pengukuran kinerja mencapai 19,50% dari bobot penilaian sebesar 30%.

Hal-hal yang perlu untuk mendapat perbaikan sebagai berikut :

a. Pengumpulan data kinerja belum menggunakan teknologi informasi.
b. Belum ada hasil evaluasi kinerja tiap triwulan.

3. **Pelaporan Kinerja**

Nilai komponen pelaporan kinerja mencapai 11,40 dari bobot penilaian sebesar 15%.

Pada komponen Pelaporan kinerja hal-hal yang perlu mendapat perbaikan sebagai berikut :

a. Dokumen LKJiP-SKPD belum menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja dilevel nasional/internasional.
b. Belum ada evaluasi kinerja ke depan secara berkala.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Nilai komponen evaluasi Akuntabilitas kinerja internal mencapai 17,00 dari bobot penilaian sebesar 25%.

Hal hal yang perlu mendapat perbaikan pada komponen evaluasi kinerja sebagai berikut :

a. Belum ada Pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

b. Belum ada Hasil dari Evaluasi Internal

f. Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora beserta seluruh jajarannya untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam Perencaan Kinerja :
   a. Setiap Individu menyusun Indikator Kinerja Individu.
   b. Melakukan monitoring dan evaluasi rencana aksi secara berkala dan hasilnya didokumentasikan.
2. Dalam Pengukuran Kinerja :
   a. Dalam Pengumpulan data Kinerja agar memanfaatkan teknologi informasi (Aplikasi)
   b. Melakukan evaluasi dan penilain kinerja setiap pegawai dan melakukan penilaian kinerja pegawai tiap triwulan.
3. Dalam Pelaporan Kinerja :
   a. Informasi yang disajikan dalam LKJiP _OPD agar dapat menginformasikan analisis dan evaluasi kinerja level nasional/internasional
   b. Informasi yang disajikan dalam LKJiP-OPD agar dimanfaatkan dalam peningkatan kinerja.
   c. Melaksanakan kegiatan evaluasi kinerja secara berkala dan hasilnya didokumentasikan.
4. Dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal :
   a. Menyusun Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
   b. Melakukan Evaluasi Internal dan melaporkan hasil nya
   c. Hasil Evaluasi Internal dijadikan pedoman perbaikan Akuntabilitas Kinerja Internal.
5. Tetap mempublikasikan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, dokumen informasi kinerja dan laporan keuangan melalui website OPD, sehingga dapat diakses dan diunduh oleh publik sebagai aspek transparansi pemerintah kepada masyarakat.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai penerapan

manajemen kinerja. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajarannya dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora.

Demikian untuk menjadikan maklum, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Plt.INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN BLORA
SEKRETARIS,

Ditandatangani secara elektronik oleh :

FREE BAYU ALAMANDA, AP, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19750305 199311 1 003

LEMBAR KERJA EVALUASI KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BLORA
TAHUN 2022

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Persentase
1	**PERENCANAAN KINERJA**	**30,00**	23,1	**77,00%**
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	4,8	**80,00%**
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	6,3	**70,00%**
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	12	**80,00%**
2	**PENGUKURAN KINERJA**	**30,00**	19,5	**65,00%**
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	4,2	**70,00%**
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan	9,00	6,3	**70,00%**
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	9	**60,00%**
3	**PELAPORAN KINERJA**	**15,00**	11,4	**76,00%**
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	2,1	**70,00%**
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4,50	4,05	**90,00%**
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	5,25	**70,00%**
4	**EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL**	**25,00**	17	**68,00%**
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	3	**60,00%**
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	5,25	**70,00%**
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	8,75	**70,00%**
Nilai Akuntabilitas Kinerja				